



FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

MRABJ

Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal

journal homepage: <http://ejournal.umri.ac.id/index.php/MRABJ>



KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, KOMPETENSI, DAN EVALUASI ANGGARAN PADA KINERJA MANAJERIAL DI OPD KABUPATEN PELALAWAN

Alya Dwi Rahmadani, Yesi Mutia Basri, Rofika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau., Pekanbaru, Indonesia

Email: yesimutia@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 25 August 2020

Accepted: 01 October 2020

Available online: 26 October 2020

Keywords:

Managerial Performance

Clarity of Budget Target

Public Accountability

Competence

Budget Evaluation

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of the Budget Targets Clarity, Public Accountability, Competence, and Budget Evaluation on Managerial Performance in Regional Apparatus Organization Pelalawan. The population in this study are civil servant who have a structural position and apparatus who have a role in budgeting at every Regional Apparatus Organization Pelalawan. The collecting data using primary data obtained from questionnaires by using purposive sampling technique. The sample in this study consists of a leaders who held position as head of the Regional Apparatus Organization, secretary or secretary level, and head of the finance sub section the total is 84 people. The results showed that the clarity of the budgetary target, public accountability, competence, and budget evaluation influences on managerial performance.

1. Pendahuluan

Kinerja manajerial pemerintah daerah merupakan isu yang saat ini menjadi perhatian publik karena masih belum menampakan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat dan mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan sebuah organisasi yang menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan untuk melayani masyarakat dan sumber pengesahannya juga berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan hasil kinerja yang baik, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat.

Suatu penilaian kinerja manajerial diperlukan untuk menilai prestasi dari organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran

manajerial pada instansi pemerintah daerah ini harus mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah (Wahyuni dan Diyanto, 2014). Menurut Mahoney *et. al.* (1963) dalam Natalia (2010), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Stoner (1992) kinerja manajerial adalah seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Permasalahan kinerja manajerial pada organisasi pemerintah sangat beragam, diantaranya masalah yang pernah menjadi sorotan publik adalah kasus yang menimpa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan. Terjadinya

kasus perencanaan yang kurang matang sehingga pada pekerjaan pengaspalan dan semenisasi yang dilakukan dalam Kota Pangkalan Kerinci maupun di kecamatan lain. Saat dilakukannya pengaspalan dan semenisasi di titik yang sudah ditetapkan, namun lokasi tersebut diharuskan pembangunan drainase atau boxcluvet. Sehingga masih terlihat realisasi hasil kerja kurang optimal dan tidak sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan (www.goriau.com). Hal ini mengindikasikan bahwa kurang baiknya kinerja pihak manajemen organisasi perangkat daerah dalam membuat perencanaan.

Penelitian sebelumnya banyak yang mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. Diantaranya adalah kejelasan sasaran anggaran. Kenis dalam Bangun (2009) menyatakan kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Penetapan tujuan secara jelas dan spesifik akan lebih produktif, hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik dalam pencapaian tujuan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pemerintah untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dengan mengetahui sasaran anggaran maka akan memudahkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau mungkin juga kegagalan yang terjadi dalam rangka pencapaian tujuan. Adapun dengan ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan karena pelaksana anggaran bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam melaksanakan pekerjaannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban yang proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Adanya akuntabilitas publik tentunya dapat meningkatkan kinerja yang

dilaksanakan semakin baik pula kinerjanya mencapai tujuan organisasi (Darmawan, 2017).

Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada dan dapat bertanggung jawab, karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kinerja manajerialnya.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah Kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang di landasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. (Wibowo, 2007:86). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kompetensi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja manajerial, dengan adanya kompetensi didalam diri seseorang, diharapkan seseorang mampu meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial. Menjelaskan bahwa faktor kompetensi dapat mempengaruhi kinerja karena dengan kemampuan yang tinggi, maka kinerja pun akan tercapai. Sebaliknya apabila kompetensi kinerja rendah atau tidak sesuai dengan keahliannya, maka kinerja pun tidak akan tercapai.

Selanjutnya yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kinerja manajerial adalah evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran di departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979). Evaluasi anggaran dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya penyimpangan dalam anggaran tersebut. Pada dasarnya evaluasi anggaran adalah proses dimana membandingkan antara anggaran yang

telah disusun dengan realisasinya, sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui apabila adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang terjadi ini akan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan hasil penelitian yang masih tidak konsisten antara satu peneliti dan peneliti lainnya, sehingga penelitian ini masih menarik untuk dikaji kembali. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian serta penambahan variabel-variabel yang di duga memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, kompetensi, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Agency Theory

Nurillah (2014) seperti yang dikutip dari Mardiasmo (2004), mengemukakan pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

2.2 Goal Setting Theory

Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh

individu. Jika seorang individu berkomitmen dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya (Locke, 1968 dalam Inapty, 2016). Menurut Mowday *et al.* (1979) dalam Inapty (2016), komitmen organisasional merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai oleh organisasi.

Dengan menggunakan pendekatan *goal theory* kinerja pegawai yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan sebagai tujuannya. Sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, kompetensi, dan evaluasi anggaran sebagai faktor penentunya. Semakin tinggi faktor penentu tersebut maka pencapaian tujuan akan semakin tinggi pula kemungkinan pencapaian tujuannya.

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Sasaran anggaran yang ditetapkan haruslah jelas dan dapat dipahami serta diterima oleh para manajer ataupun bawahan. Kejelasan sasaran anggaran adalah sesuatu untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu, seperti tahunan, semesteran, ataupun triwulan. Sasaran anggaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran anggaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai (Halim, 2005).

Sebagai alat perencanaan, kejelasan sasaran anggaran akan menghasilkan kinerja manajerial yang lebih baik. Maka dari itu kualitas anggaran dapat menentukan kualitas pelaksanaan pemerintah daerah. Dimana, kejelasan sasaran anggaran dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Sebaliknya, ketidakjelasan sasaran anggaran akan menimbulkan keragu-raguan bagi pimpinan dalam bertindak. Keraguan ini akan menimbulkan ketidakpuasan sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian Efrizar (2017), Jatmiko (2017), dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial OPD.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

2.4 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban dari proses awal perencanaan sampai dengan pelaksanaannya harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Publik memiliki hak atas segala penggunaan dana publik dan berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

Menurut Deddi (2010), pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas publik dapat memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga kinerja dari pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal dan juga eksternal. Hasil Penelitian ini didukung oleh Putri (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

2.5 Kompetensi

Menurut Wibowo (2007), kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang di landasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2006 standar kompetensi kerja adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompetensi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja manajerial, dengan adanya kompetensi di dalam diri seseorang maka diharapkan seseorang mampu meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial. Hasil Penelitian ini didukung oleh Napitupulu (2017) dan Riyanda (2017) yang menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja

manajerial. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H3: Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

2.6 Evaluasi Anggaran

Kinerja suatu organisasi pemerintah tidak hanya dinilai dari motivasi ataupun kemampuan suatu organisasi dalam menyelesaikan suatu program yang telah dibuat. Namun, kinerja juga dinilai dari seberapa bijak organisasi tersebut untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk menilai itu diperlukannya evaluasi anggaran demi mengetahui sejauh mana kinerja dari organisasi tersebut. Dengan dilakukannya evaluasi anggaran, maka akan diketahui kinerja pada periode itu, dan diharapkan akan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Adapun proses dimana membandingkan antara anggaran yang telah disusun dengan realisasinya dapat mengetahui apabila adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang terjadi ini akan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja. Hasil Penelitian ini didukung oleh Putri (2017), Nasution (2018) dan Nurlelahayati (2017) yang menyatakan bahwa Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H4: Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah ASN yang memiliki posisi struktural dan aparat yang memiliki peran dalam penyusunan anggaran pada setiap OPD di Kabupaten Pelalawan yang tersebar di 28 OPD. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penentuan sampel *purposive sampling* dengan kriteria yaitu: (1) Pimpinan yang memegang posisi sebagai kepala OPD Kabupaten Pelalawan; (2) Sekretaris atau setingkat Sekretaris OPD Kabupaten Pelalawan; (3) Kepala Sub Bagian Keuangan OPD Kabupaten Pelalawan. Sampel yang diambil berdasarkan kriteria di atas adalah sebanyak 84 pejabat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Metode analisis data

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

Variabel dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Manajerial dan yang menjadi variabel bebas adalah Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Kompetensi, dan Evaluasi Anggaran.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan terhadap 84 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data. Statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Deskriptif Statistik

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran	84	24	35	30,44	2,672
Akuntabilitas Publik	84	31	45	38,88	3,625
Kompetensi	84	27	40	33,50	3,149
Evaluasi Anggaran	84	20	30	25,15	2,801
Kinerja Manajerial	84	24	40	32,62	3,874
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Data Olahan (2020)

Untuk instrumen variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai maksimum 35 dan nilai minimum 24, sehingga nilai rata-rata jawaban kejelasan sasaran anggaran 30,44. Hal ini menunjukkan rata-rata responden memahami dan mengerti secara baik kejelasan sasaran anggaran yang terjadi pada OPD masing-masing. Untuk instrumen variabel akuntabilitas publik memiliki nilai maksimum 45, dan nilai minimum 31, sehingga nilai rata-rata jawaban akuntabilitas publik 38,88. Hal ini menunjukkan rata-rata responden memahami dan mengerti secara baik akuntabilitas publik yang terjadi pada OPD masing-masing. Untuk instrumen variabel kompetensi memiliki nilai maksimum 40 dan nilai minimum 27, sehingga nilai rata-rata jawaban kompetensi 33,50. Hal ini menunjukkan rata-rata responden memahami dan mengerti secara baik kompetensi yang terjadi pada OPD masing-masing. Untuk instrumen variabel evaluasi anggaran memiliki nilai maksimum 30 dan nilai minimum 20, sehingga nilai rata-rata jawaban evaluasi anggaran 25,15. Hal ini menunjukkan rata-rata

responden memahami dan mengerti secara baik evaluasi anggaran yang terjadi pada OPD masing-masing. Untuk instrumen variabel kinerja manajerial auditor memiliki nilai maksimum 40 dan nilai minimum 24, sehingga nilai rata-rata jawaban kinerja manajerial 32,62. Hal ini menunjukkan bahwa respon pada Organisasi Perangkat Daerah sudah sangat baik.

4.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dari pengujian regresi linier berganda yang dilakukan, diperoleh hasil uji pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-5,149	3,520	-1,463	,148
Kejelasan Sasaran Anggaran	,365	,164	2,217	,029
Akuntabilitas Publik	,221	,110	2,011	,048
Kompetensi	,308	,115	2,671	,009
Evaluasi Anggaran	,308	,147	2,094	,039

Sumber: Data Olahan (2020)

4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan koefisien determinasi (R^2). Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini R^2 digunakan untuk menggambarkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 3. Hasil uji Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,783	,613	,593

Sumber: Data Olahan 2020

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa *adjusted R square* sebesar 0,593 yang menjelaskan bahwa variabel-variabel independen dapat menjelaskan 59,3% variabel dependen, yaitu kinerja manajerial. Artinya variabel dependen memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variasi variabel

independen, sedangkan sisanya yaitu sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja manajerial

Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima. Berpengaruhnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran akan semakin baik kinerja manajerialnya.

Hal ini sesuai dengan teori penetapan tujuan dimana Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu berkomitmen dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya.

Kejelasan sasaran anggaran yang dimiliki seorang auditor sebagai indikator penting yang harus ada dalam diri seorang auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga apabila kejelasan sasaran anggaran telah diterapkan dalam diri seseorang, maka hal tersebut akan berpengaruh dalam peningkatan kinerja manajerial yang dihasilkan.

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas dan spesifik akan memudahkan orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Sebagai alat perencanaan, kejelasan sasaran anggaran akan menghasilkan kinerja manajerial yang lebih baik. Maka dari itu kualitas anggaran dapat menentukan kualitas pelaksanaan pemerintah daerah. Dimana, kejelasan sasaran anggaran dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Sebaliknya, ketidakjelasan sasaran anggaran akan menimbulkan keragu-raguan bagi pimpinan dalam bertindak. Keraguan ini akan menimbulkan ketidakpuasan sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Seperti yang dikemukakan oleh Sari (2014), anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum. Tetapi lebih dari itu anggaran harus memberikan informasi

mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur dalam pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi pemerintah daerah, dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif untuk melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efrizar (2017), Jatmiko (2017), dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial OPD.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja manajerial

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik (X_2) berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dinyatakan diterima. Berpengaruhnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas publik maka akan semakin baik kinerja manajerialnya.

Hal ini dapat diartikan peningkatan yang terjadi pada kinerja manajerial dapat dicapai apabila seseorang memiliki akuntabilitas publik yang baik. Sesuai dengan teori keagenan dimana menurut Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa “akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Menurut Deddi (2010), pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas publik dapat memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga kinerja dari pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal dan juga eksternal. Dengan demikian, akuntabilitas publik dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Putri (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau semakin meningkat akuntabilitas publik maka kinerja manajerialnya juga akan semakin meningkat dan berlaku sebaliknya.

Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja manajerial

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel kompetensi (X_3) berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Menurut Wibowo (2007), kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang di landasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori penetapan tujuan yang menunjukan adanya hubungan antara tujuan yang di tetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Dalam teori ini menjelaskan sesuatu yang ingin di capai dan merupakan pendorong atau motivasi sehingga akan mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya dan bisa mengarah pada kinerja yang lebih tinggi. Dan juga jika seseorang individu berkomitmen dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya. Sudarmanto (2009) mengemukakan bahwa kompetensi dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Dimana semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka akan semakin terampil dan semakin cepat pula dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, maka pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, sehingga dapat memungkinkan peningkatan kerjanya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2017) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja manajerial. Penelitian Riyanda (2017) yang juga menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja manajerial

Hasil pengolahan data variabel evaluasi anggaran (X_4) berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Hal ini sesuai dengan teori penetapan tujuan dimana Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu berkomitmen dengan sasaran tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya. Dengan menggunakan pendekatan penetapan tujuan kinerja pegawai yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan sebagai tujuannya. Sedangkan variabel evaluasi anggaran sebagai penentunya. Semakin tinggi faktor penentu tersebut maka pencapaian tujuan akan semakin tinggi pula kemungkinan pencapaian tujuannya.

Kinerja suatu organisasi pemerintah dalam menyelesaikan suatu program yang telah dibuat, akan tetapi kinerja juga dinilai dari seberapa bijak organisasi tersebut untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk menilai itu diperlukannya evaluasi anggaran demi mengetahui sejauh mana kinerja dari organisasi tersebut. Dengan dilakukannya evaluasi anggaran, maka akan diketahui kinerja pada periode itu, dan diharapkan akan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen (Kenis, 1979). Evaluasi anggaran terlihat pada siklus anggaran tahap keempat, yaitu tahap pelaporan dan evaluasi anggaran yang terkait dengan aspek akuntabilitas (Mardiasmo, 2009). Pada tahap ini anggaran di pertanggung jawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya (Mahsun et al, 2011). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017), Nasution (2018) dan Nurlalahayati (2017) yang menyatakan bahwa Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, kompetensi dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Pengaruh kejelasan sasaran, akuntabilitas publik, kompetensi dan evaluasi anggaran terhadap kinerja manajerial memiliki arah hubungan yang positif artinya semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, kompetensi dan evaluasi anggaran maka akan semakin tinggi kinerja manajerialnya.

Implikasi pada penelitian ini dilihat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial organisasi perangkat daerah kabupaten pelalawan, dimana faktor tersebut yaitu kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, kompetensi, dan evaluasi anggaran. Sedangkan secara praktis, penelitian ini akan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu manajer dalam mempertimbangkan berbagai hal untuk pengambilan keputusan yang akan membantu dalam meningkatkan kinerja manajerial. Meningkatnya kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah dapat membantu dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Arfan, M. (2014). Pengaruh Komitmen Organisasional Dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gowa), *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makasar
- Candrakusuma, D. A., dan Jatmiko, B. (2017). Dampak Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 24(1).
- Darmawan, R., Azlina, N., dan Hariyani, E. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Di Skpd Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 792-806.
- Efrizar, R., Hardi, H., dan Wiguna, M. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Skpd Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1726-1740.
- Kanji, L. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Kota Makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(1), 58-64.
- Melia, P., dan Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1068-1079.
- Napitupulu, B., Amelya, L., Mafis, R. A., dan Alamsyah H. M. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasional, Motivasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial pada Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 338-352.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- Peraturan Perundang - undangan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- Riyanda, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Saukani, S., Rasuli, M., dan Darlis, E. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran

terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. *Sorot*, 10(2), 179-193.

Ufairah, A. N. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 2(2), 1-11.

Wahyuni, R., Rasuli, M., Diyanto, V. (2014). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasidan akuntabilitas public terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (Studi empiris pada skpd pemerintah Kota Pekanbaru) *Jom Fekom*, 2(2), 1-15.

<http://www.pelalawankab.go.id/portal/>

<http://www.riau-global.com>

<https://www.goriau.com>.